

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, memiliki daya saing, serta sejahtera merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila. Selain itu tujuan pembangunan nasional juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu situasi yang selalu menjadi tujuan serta cita-cita semua bangsa di dunia. Di Indonesia sendiri, pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat dijadikan sebagai hakikat pembangunan nasional Indonesia. Perencanaan pembangunan pada masa sekarang ini tentunya seakan-akan dijadikan sebagai kegiatan yang utama oleh pemerintah, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai modernisasi. Maka dari itulah pemerintah semakin menggiatkan kegiatan pembangunan agar bisa mencapai keinginan untuk membuat negara modern.²

Melalui beberapa proses pembangunan yang meliputi sosial, ekonomi, serta institusional menjadikannya motivasi bagi masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan seperti halnya kehidupan yang tentunya serba lebih baik lagi. Dilaksanakannya sebuah kegiatan

² Solikatur dkk., “Kemiskinan dalam Pembangunan”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 03 No. 01, April 2014, hlm. 71

pembangunan ini tidak lain juga agar bisa membantu menangani masalah kemiskinan baik secara absolut maupun secara relatif. Maka dari itu, secara integral permasalahan kemiskinan adalah salah satu bagian dari persoalan yang ada dalam pembangunan yang tentunya harus diatasi.

Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan seseorang untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan papan. Bank Dunia sendiri mengartikan kemiskinan sebagai kekurangan yang mana diukur dengan melalui tingkat kesejahteraan. Dalam beberapa kasus, kemiskinan diukur dengan menggunakan terminologi kesejahteraan ekonomi seperti halnya pendapatan dan juga konsumsi. Seseorang dikatakan miskin apabila mereka berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.³

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang tidak bisa dianggap remeh dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan yang juga bisa saja terjadi di manapun, bisa di negara berkembang bahkan juga negara maju sekalipun. Kemiskinan menjadi bagian dari permasalahan pada bidang ekonomi, oleh karena itu kemiskinan haruslah dipulihkan atau setidaknya dikurangi. Salah satu titik ukur kondisi sosial ekonomi untuk menilai kesuksesan dalam pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah pada suatu wilayah adalah kemiskinan itu sendiri.

³ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), hlm. 9

Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang bisa membahayakan akhlak, kelogisan dalam berfikir, keluarga, dan masyarakat. Islam juga menganggap kemiskinan sebagai suatu musibah dan juga bencana yang mana seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas suatu kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Apabila kemiskinan ini semakin merajalela, maka hal ini akan menjadi kemiskinan yang bisa membuat lupa akan adanya Allah dan juga rasa sosial kepada sesama. Seperti jika seseorang memiliki kekayaan yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya itu membuatnya seperti seseorang yang dzalim kepada Allah, manusia dan bahkan juga dirinya sendiri (Qardhawi, 2005). Menurut Al-Maududi (1980), untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan dipakai dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik seperti, berusaha dan bekerja, larangan memupuk harta, zakat, hukum waris, ghanimah serta hemat.⁴

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memperkenalkan berbagai macam program dengan menyertakan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional masih belum mampu untuk menuntaskan masalah kemiskinan secara serius. Beragamnya keadaan masyarakat pada suatu wilayah merupakan salah satu ciri dari penyebab kemiskinan, selain itu juga karena rendahnya kemajuan ekonomi dan

⁴ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pengembangan Islam*, Ed. 01, Cet. 02, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23

pertumbuhan ekonomi serta kebijakan luar negeri yang masih memengaruhi kebijakan dalam negeri dari segi pendanaan.

Pada pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-empat telah disebutkan mengenai tujuan negara yaitu “memajukan kesejahteraan umum” yang mana merupakan sumber dari landasan hukum dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana adalah produk hukum yang memberikan dasar bagi perencanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁵ Selanjutnya sekarang ini landasan hukum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak didasarkan pada dukungan peraturan perundang-undangan spesifik, seperti UU, permen, perpres, maupun juga inpres PNPM Mandiri. Akan tetapi yang digunakan untuk menjadi acuan utamanya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.⁶

Menurut World Factbook, BPS dan Bank Dunia, Indonesia sendiri dicatat sebagai negara yang memiliki kemampuan dalam pengentasan kemiskinan tercepat di antara negara-negara yang lainnya. Terbukti di tahun 1999, Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 23,43% dan 12,49 di tahun 2011. Tentunya tercapainya hal tersebut

⁵ Emmy Latifah, “Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi pada Millennium Development”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 03, September 2011, hlm. 405

⁶ Pocut Eliza dkk., *Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: BPHN, 2016) hlm. 19

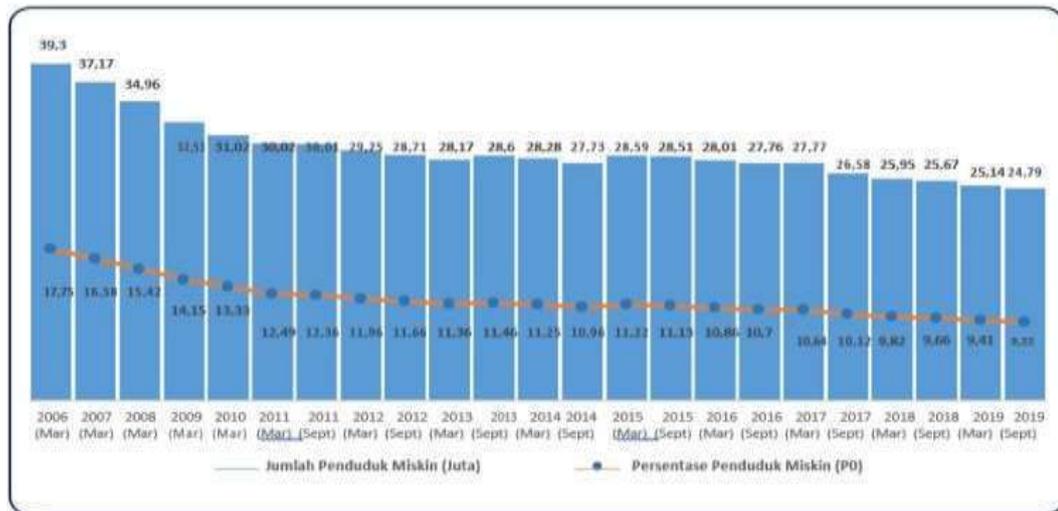
dikarenakan pengaruh dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1998 sampai saat ini.⁷

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan, telah berhasil dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia terutama untuk saat ini. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2015. Dilihat dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin pernah mengalami kenaikan pada periode September 2013. Akan tetapi, jika ditelaah kembali secara umum, mulai dari periode 2016 sampai September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dilihat dari segi jumlahnya maupun juga dari segi persentase. Pada periode September 2013 dan juga Maret 2015, penduduk miskin mengalami peningkatan yang mana hal tersebut adalah dikarenakan adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan yang terjadi pada harga bahan bakar minyak. Untuk perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2006 sampai dengan September 2019 yang lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

⁷ Ulfatul Umami, "Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 09 No. 04, Desember 2013, hlm. 350

Gambar 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006-September 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2019

Dari data di atas dapat dilihat jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia pada periode September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Bila dibandingkan dengan periode Maret 2019, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 358,9 ribu orang. Lalu jika dibandingkan dengan periode September 2018, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 888,7 ribu orang. Untuk persentase penduduk miskin pada periode September 2019 adalah sebesar 9,22 persen, mengalami penurunan sebesar 0,19 persen jika dibandingkan dengan periode Maret 2019 dan mengalami penurunan sebesar 0,44 persen jika dibandingkan dengan periode September 2018.

Dari keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan tersebut tentunya terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, yaitu dengan melalui program-program

penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan setelah tahun 1998. Program pengentasan kemiskinan bisa dikatakan berorientasi pada dua sasaran yaitu kepada masyarakat secara personal dan juga kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan.

Selain itu juga telah dibagi ke dalam tiga cluster. Di mana cluster 1 ditujukan untuk mengurangi beban hidup serta memperbaiki kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Program yang dimaksud seperti hal nya pendistribusian Raskin, pemberian BSM, pemberian Jamkesmas, serta pemberian BLT atau PKH. Lalu pada cluster 2 memiliki fokus terhadap peningkatan kapabilitas masyarakat miskin, seperti hal nya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Selanjutnya untuk cluster 3 fokus terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil, di mana program yang dilaksanakan adalah dengan memberikan kredit untuk usaha mikro dan kecil (Kredit Usaha Rakyat/KUR). Dari adanya tiga cluster tersebut, yang menjadi program yang diprioritaskan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah cluster 1, hal ini dikarenakan cluster 1 secara langsung berkaitan dengan terwujudnya hak asasi manusia.⁸

Di Jawa Timur sendiri tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada periode Maret 2011 sampai dengan periode September 2019, kecuali pada periode September 2013 dan periode Maret 2015 yang mengalami peningkatan. Penyebab meningkatnya angka kemiskinan yang terjadi pada

⁸ *Ibid*, hlm. 350

periode September 2013 dan periode Maret 2015 adalah dikarenakan adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan yang terjadi pada harga bahan bakar minyak. Untuk perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode Maret 2011 sampai dengan September 2019 yang lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, 2011-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2019

Jika ditelaah kembali selama periode Maret 2019 hingga periode September 2019, persentase penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,17 persen, di mana yang awalnya 10,37 persen pada periode Maret 2019 menjadi 10,20 persen pada periode September 2019.

Dari data perkembangan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tersebut terlihat jelas bahwa selama kurun waktu sembilan tahun Provinsi Jawa Timur telah mampu menurunkan tingkat kemiskinannya dari yang awalnya 14,27 persen pada periode Maret 2011 menjadi 10,20 persen pada periode September 2019. Dengan rentang waktu sembilan tahun penurunan yang terjadi tidak bisa dikatakan banyak, akan tetapi hal tersebut

sudah menjadi suatu kesuksesan bagi pemerintah karena berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Walaupun pada September 2013 dan periode Maret 2015 persentase kemiskinan justru mengalami kenaikan. Dari perkembangan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang cenderung mengalami penurunan tersebut menjadikan minat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan faktor apa saja yang bisa memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian akan diperoleh faktor apa saja yang seharusnya segera ditindaklanjuti agar bisa membantu mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut.

Todaro (1997) menyatakan bahwa

Variasi kemiskinan pada negara berkembang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Geografis; Jumlah penduduk dan Tingkat pendapatan; Sejarah; Kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya; Peranan sektor swasta dan negara; Struktur industri; Derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan Pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.⁹

Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio.

Pertumbuhan ekonomi adalah kunci dalam menurunkan kemiskinan pada suatu wilayah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada

⁹ Baiq Tisniwati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 01, Juni 2012, hlm. 36

setiap provinsi menandakan bahwa pemerintah telah mampu melakukan peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya, sehingga hal tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (1999)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar ataukah lebih kecil. Pembangunan ekonomi sendiri tidak cuma diukur dengan berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, akan tetapi haruslah memerhatikan penyebaran dari distribusi pendapatan tersebut apakah telah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengetahui siapa saja yang telah menikmati hasilnya. Dari hal tersebut artinya bahwa menurunnya PDRB pada suatu daerah maka akan memiliki dampak terhadap kualitas konsumsi rumah tangga.¹⁰

Menurut Hadi Sasana (2006)

PDRB menjadi salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, di mana PDRB ini adalah nilai bersih atas barang dan juga jasa akhir yang telah dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu.¹¹

Apabila PDRB dalam suatu daerah semakin tinggi, maka tentunya kemampuan sumber penerimaan daerah yang ada juga akan semakin besar, hal ini dikarenakan pendapatan penduduk yang juga semakin besar. Lalu di sini bisa diartikan jika PDRB dalam suatu daerah semakin tinggi maka penduduk juga akan semakin sejahtera. Sehingga dengan begitu akan membuat berkurangnya penduduk miskin. PDRB ditunjukkan dalam bentuk data statistik, yang mana berasal dari rangkuman perolehan nilai tambah

¹⁰ Ridzky Giovanni, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 07 No. 01, 2018, hlm. 30

¹¹ I Made Parwata dkk., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan", *Jurnal Manajemen*, Vol. 4, 2016, hlm. 2

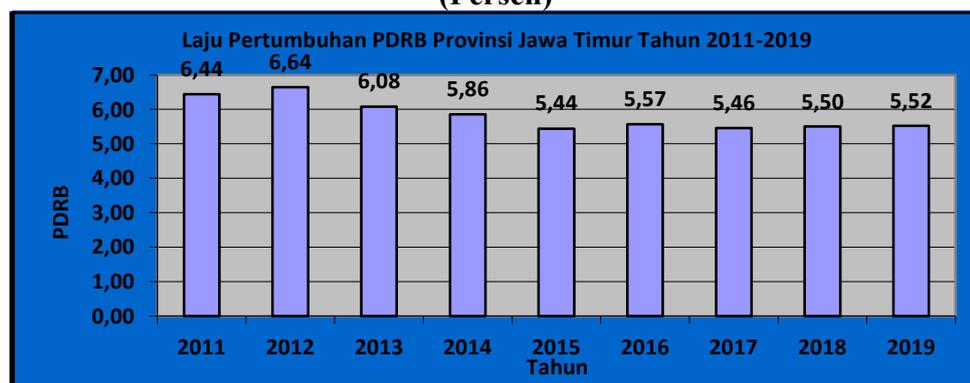
akibat adanya proses suatu produksi pada barang ataupun juga jasa pada suatu daerah dengan periode waktu tertentu yang umumnya selama satu tahun atau triwulan dengan tidak mencermati domisili dari pelaksana produksi tersebut. Selain itu PDRB juga dipakai dalam mengetahui tingkat perkembangan dan struktur perekonomian pada suatu wilayah dengan menjadi salah satu indikator dari ekonomi makro.¹²

Menurut Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk mengetahui keberhasilan dalam pembangunan serta merupakan syarat keharusan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang menjadi syarat kecukupannya ialah di mana pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki keefektifan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang artinya, pertumbuhan tersebut setidaknya menyebar kepada setiap golongan pendapatan, termasuk pada golongan penduduk miskin.¹³

Berikut ini adalah data laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011-2019:

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019
(Persen)



Sumber: BPS, Data dan Statistik Ekonomi dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

¹² M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 01 No. 01, 2017, hlm. 115

¹³ Ridzky Giovanni, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan...", hlm. 30

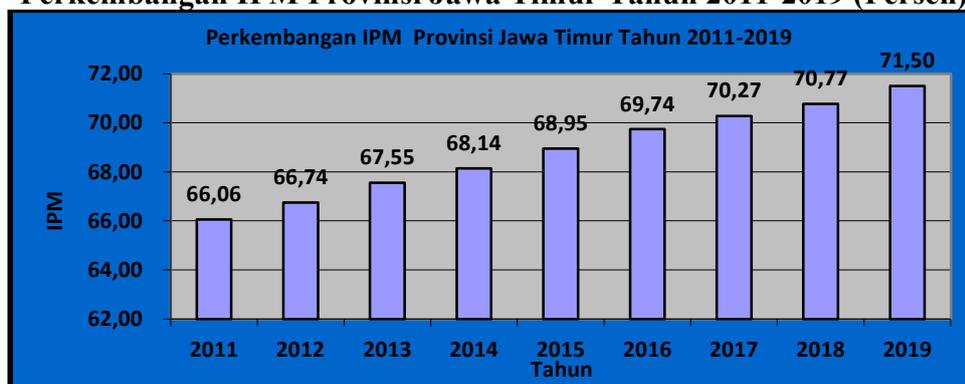
Dari data di atas dapat dilihat bahwa perekonomian Jawa Timur pada tahun 2019 sedikit menguat dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Peningkatan laju ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang awal mulanya sebesar 5,50 persen pada tahun 2018 naik sebesar 0,02 persen hingga menjadi 5,52 persen pada tahun 2019.

Selain PDRB, kualitas sumber daya manusia juga bisa menjadi faktor penyebab dari kemiskinan. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. IPM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Suatu penemuan untuk menilai pembangunan manusia adalah IPM itu sendiri.

Selain itu IPM juga menjadi bagian dari titik ukur dalam pembangunan di suatu daerah yang berhubungan negatif terhadap keadaan kemiskinan pada daerah tersebut. Oleh sebab itu, apabila nilai IPM pada suatu wilayah tinggi diharapkan masyarakat juga memiliki kualitas hidup yang tinggi pula, dengan kata lain nilai IPM yang tinggi akan mengarah pada rendahnya tingkat kemiskinan. Terdapat beberapa komponen dalam menghitung IPM berdasarkan data, yaitu meliputi angka harapan hidup untuk menilai kesuksesan pada aspek kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah untuk menilai kesuksesan pada aspek pendidikan, serta kemampuan daya beli penduduk untuk menilai kesuksesan pada aspek

pembangunan kehidupan yang memadai.¹⁴ Berikut ini adalah data perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011-2019:

Grafik 1.2
Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019 (Persen)



Sumber: BPS, Data dan Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur secara terus menerus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Dari yang awalnya sebesar 66,06 persen pada tahun 2011 mengalami peningkatan hingga menjadi 71,50 persen pada tahun 2019, di mana selama periode tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,44 persen. Sehingga jika di rata-rata maka pertumbuhan IPM selama kurun waktu 2011-2019 adalah sebesar 0,68 persen per tahunnya.

Selanjutnya faktor lain yang juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini bisa terjadi pada semua provinsi di Indonesia termasuk juga di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan distribusi pendapatan ini dicerminkan ke dalam Gini Ratio. Di mana apabila Gini Ratio mendekati

¹⁴ M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin...", hlm. 114

angka nol, maka akan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang rendah. Sedangkan apabila Gini Ratio mendekati angka satu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang tinggi.

Menurut Todaro (2011)

Ketimpangan mempunyai dampak yang positif maupun juga negatif. Dampak positif yang terjadi akibat adanya ketimpangan yaitu bisa memberikan dorongan kepada wilayah lainnya yang kurang maju agar bisa bersaing dan juga meningkatkan pertumbuhannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dampak negatif yang terjadi akibat ketimpangan yang berlebihan yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan juga solidaritas, selain itu ketimpangan yang tinggi umumnya juga dipandang tidak adil.¹⁵

Dalam penelitian yang telah ada sebelumnya Gini Ratio memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Itu berarti apabila terjadi peningkatan pada Gini Ratio maka hal tersebut juga akan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut yaitu dikarenakannya adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang mana akan menimbulkan ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang tidak merata.¹⁶ Berikut ini adalah data Gini Ratio Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011-2019:

¹⁵ Hastina Febriaty Nurwani, "Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara", *QE Journal*, Vol. 06 No. 03, Desember 2017, hlm. 177

¹⁶ Saddam Tubaka, "Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur", *Jurnal Ekonomi*, Vol. XIII No. 1, Desember 2019, hlm. 124

Grafik 1.3
Gini Ratio Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019 (Persen)



Sumber: BPS, Data dan Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Gini Ratio di Jawa Timur pada tahun 2011-2013 secara terus-menerus adalah sebesar 0,36. Selanjutnya Gini Ratio mengalami peningkatan terus hingga mencapai angka yang tertinggi sebesar 0,42 pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya Gini Ratio mengalami penurunan hingga menjadi 0,40 pada tahun 2016 dan juga 2017. Lalu pada tahun setelahnya mengalami penurunan secara terus-menerus sampai dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,36.

Dalam suatu wilayah pembangunan yang ada memanglah tidak bisa selalu adil. Permasalahan yang terjadi akibat adanya suatu pembangunan yang belum adil tidak mampu dibasmi oleh pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai, di mana bertepatan dengan itu pertumbuhan ekonomi pada beberapa wilayah juga mengalami pertumbuhan secara lambat. Dikarenakan minimnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah maka menjadikan wilayah tersebut tidak mengalami perkembangan serta kemajuan. Secara keseluruhan yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu wilayah adalah dikarenakan tidak meratanya PDRB pada sebagian

wilayah, berbedanya IPM pada sebagian wilayah serta perbedaan Gini Ratio pada sebagian wilayah juga.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya di atas, mengenai data PDRB dan Gini Ratio yang cenderung mengalami naik turun dan data IPM yang cenderung mengalami kenaikan, serta pembahasan mengenai pengaruh yang diberikan oleh PDRB, IPM dan Gini Ratio terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengusung judul pada penelitian ini dengan berjudul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persentase kemiskinan di Jawa Timur dari lima tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut juga diikuti oleh Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur yang mana kebanyakan juga mengalami penurunan walaupun belum keseluruhan.
2. Laju pertumbuhan PDRB di Jawa Timur mengalami naik turun, namun pada tiga tahun terakhir PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota yang

berada di Jawa Timur di mana rata-rata setiap tahunnya juga mengalami naik turun, namun ada beberapa wilayah yang juga berhasil mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

3. Perkembangan IPM di Jawa Timur pada setiap tahunnya secara terus menerus mengalami kenaikan, hal tersebut juga diikuti oleh Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur yang mana semuanya mengalami kenaikan secara terus menerus dalam lima tahun terakhir.
4. Gini ratio di Jawa Timur mengalami naik turun, namun pada tiga tahun terakhir Gini Ratio terus mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur di mana rata-rata setiap tahunnya juga mengalami naik turun.
5. Laju pertumbuhan PDRB, perkembangan IPM, serta Gini Rasio memiliki pengaruh terhadap naik dan turunnya tingkat kemiskinan yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini ada pokok-pokok masalah, yaitu: “Sejauh mana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah disampaikan maka dari itu peneliti mengulas beberapa rumusan masalah, meliputi:

1. Apakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pengaruh Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian kali ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji pengaruh Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

E. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian kali ini agar dapat memiliki sejumlah manfaat sekiranya untuk penulis ataupun juga untuk pihak-pihak yang berkaitan. Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pusat Statistik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi kepada Badan Pusat Statistik untuk lebih memerhatikan mengenai hal-hal yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan imbuhan referensi serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau literatur dalam suatu penelitian untuk para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah atau daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini membahas mengenai “pengaruh produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur”. Adanya penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X sebagai variabel bebas (independen) yang meliputi variabel X_1 (PDRB), variabel X_2 (IPM), dan variabel X_3 (GR), serta variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu tingkat kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Batasan pada penelitian itu sendiri meliputi:

- a. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

- b. Periode penelitian yang akan diamati yaitu data badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019.
- c. Pada penelitian ini dibatasi dengan variabel bebas X_1 (PDRB), variabel X_2 (IPM), dan variabel X_3 (GR), serta variabel Y (Tingkat Kemiskinan).

G. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari adanya kesalahpahaman, dan untuk mempermudah dalam menelaah dan memahami pokok-pokok permasalahan pada uraian yang selanjutnya, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian yang ada di dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan

Dalam arti sempit, kemiskinan merupakan situasi yang sedang dihadapi seseorang yang memiliki kekurangan uang maupun barang dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam arti luas, kemiskinan adalah suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Selain itu definisi kemiskinan adalah suatu standar tingkat yang rendah, yang artinya keadaan yang terjadi pada sejumlah atau sekelompok orang yang memiliki tingkat kekurangan

materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umumnya terjadi atau berlaku pada suatu masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

b. PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai atas barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada pada suatu daerah dengan periode waktu tertentu. Data PDRB adalah salah satu indikator yang bisa dipakai dalam mengukur suatu kondisi perekonomian pada daerah tersebut. Data PDRB bisa dihitung dengan menggunakan dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. Dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada suatu tahun tertentu yang menjadi dasarnya.¹⁸

c. IPM

IPM menjadi alat ukur dalam mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) sampai 1 (tingkat pembangunan yang paling tinggi). IPM sendiri adalah indeks gabungan dari tiga indikator, yang meliputi ukuran harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) yang mana diukur melalui gabungan dari

¹⁷ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Ed. 01, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1

¹⁸ Dian Parwitasari, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Triwulan Menurut Pengeluaran 2015-2019*, (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020), hlm. 1

melek huruf orang dewasa (berbobot tiga per empat) dan rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga), serta standar hidup yang layak (*decent standard of living*) seperti halnya yang telah diukur oleh PDB riil per kapita pada ukuran purchasing power parity dengan mata uang dolar atau PPP\$.¹⁹

d. Gini Ratio

Gini Ratio (Koefisien Gini) merupakan angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk pada suatu negara. Di mana biasanya nilainya tersebut berkisar di antara angka nol sampai satu. Jika nilai Gini Ratio yang dimiliki itu baik, maka artinya tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara kelompok masyarakat kaya dan miskin pada suatu negara bisa dikatakan cukup rendah. Namun apabila nilai Gini Ratio yang dimiliki tersebut tinggi, maka memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan yang lebar terjadi di antara kelompok yang memiliki penghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.²⁰

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Definisi operasional dari penelitian “Pengaruh Produk

¹⁹ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 27

²⁰ Dodik Ridho Nurrochmat dkk., *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan*, (Bogor: IPB Press, 2016), hlm. 95

Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019” ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel PDRB, IPM dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Yang mana variabel Tingkat Kemiskinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Adapun yang menjadi indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sendiri memiliki beberapa indikator, meliputi: Kesejahteraan masyarakat; Kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pengeluaran; Pertumbuhan ekonomi; Langkanya alat pelengkap kebutuhan dasar; serta Akses yang sulit pada pendidikan dan juga pekerjaan.

b. PDRB

PDRB sendiri memiliki beberapa indikator, meliputi: Aktifitas ekonomi; Produksi barang dan juga jasa; Perubahan harga; Lapangan usaha; serta Pengelolaan SDA dan SDM yang ada.

c. IPM

IPM sendiri memiliki beberapa indikator, meliputi: Umur yang panjang dan kehidupan yang sehat (a long and healthy life) atau indikator kesehatan; Pengetahuan (knowledge) atau indikator

pendidikan; serta Standar kehidupan yang layak (decent standar of living) atau indikator daya beli.

d. Gini Ratio

Gini Ratio sendiri memiliki beberapa indikator, meliputi: Tingkat ketimpangan pendapatan; Jumlah penduduk atau populasi; Jumlah pendapatan penduduk; serta Jumlah pengeluaran penduduk.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas VI (enam) bab. Dari masing-masing bab tersebut mempunyai subbab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar nantinya bisa dipahami dengan jelas. Adapun sistematika penulisan ini yaitu meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini sebagaimana pada penelitian yang ada pada umumnya. Dimana bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) manfaat penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini merupakan landasan teori. Di mana bab dua ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) kajian teoritis, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dalam penelitian ini merupakan metode penelitian. Di mana bab tiga ini di dalamnya mencakup uraian mengenai: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, serta (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian. Di mana bab empat ini di dalamnya mencakup uraian mengenai (a) hasil penelitian dan (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima dalam penelitian ini merupakan pembahasan. Di mana bab lima ini didalamnya mencakup uraian mengenai pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam dalam penelitian ini merupakan penutup yang menjadi akhir dari penelitian. Di mana bab enam ini di dalamnya mencakup uraian mengenai (a) kesimpulan dan (b) saran. Kesimpulan yang diperoleh

dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan oleh penulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.